



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# RENCANA KERJA AKHIR

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2026

*"Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat"*

2025





**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 100.3.3.1/ 339 /BAPPEDA/2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Agustus 2025

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
HIDAYAT ARSANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG  
NOMOR: 100.3.3.1/ 334 /BAPPEDA/2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2026

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

- I. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- II. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- III. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- IV. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- V. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- VI. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- VII. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- VIII. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- IX. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- X. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XI. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XII. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XIII. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XIV. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XV. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XVI. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XVII. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XVIII. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XIX. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XX. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXI. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXII. Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- XXIII. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;

- XXIV. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXV. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXVI. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXVII. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXVIII. Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXIX. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

# PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Rancangan Rencana Kerja Awal Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Kerja Awal Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini adalah dokumen perencanaan selama 1 tahun kedepan yang dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata saat tahun berjalan untuk mewujudkan target-target indikator kinerja yang telah disusun sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, September 2025

Kepala Dinas,  
Pekerjaan Umum Penataan Ruang  
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman



**JANTANI ALI, S.T**

Nip. 197310222005011007

# DAFTAR ISI

---

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	27
<b>BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>44</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran .....	45
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>47</b>
4.1. Program dan Kegiatan.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>

# DAFTAR TABEL

---

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Pelaksanaan Renja Tahun n-2 .....	8
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Renja dan Renstra PD .....	23
Tabel 2.4 Target dan Realisasi IKU 2023-2026 .....	33
Tabel 2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD 2026 .....	36
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	48
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator Kinerja .....	34
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan .....	48

# B A B I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman merupakan perumusan Rencana Strategis Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perubahan Renstra Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah (PD), Renja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran dari Renstra Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Penyusunan Renja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar terwujud sinergi dan sinkronisasi capaian kerja tahunan Perangkat Daerah dengan rencana tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, maka dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pula kepada Arah kebijakan Provinsi dan Nasional.
3. Renja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan program prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Renja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hingga tahun yang telah dilalui.

Renja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Daerah, dalam penyusunan Renja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuat beberapa hal antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.
2. Kesesuaian program yang tercantum dalam Renja dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dalam dokumen Renstra pada tahun berjalan.
3. Program dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran (*output*), yang bersifat realistis dan terukur, dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Mengingat kedudukan strategis tersebut maka untuk menghasilkan dokumen Renja yang berkualitas terdapat tahapan proses dan cakupan komprehensif yang harus terpenuhi. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
  1. Persiapan Penyusunan Persiapan penyusunan renja meliputi:
    - (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah.
    - (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah.
    - (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan,
    - (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.
  2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
  3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah untuk kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
  4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
  5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

6. Penetapan BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. Penutup.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Tahun Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri D)
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
26. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/334/BAPPEDA/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta bidang urusan Pertanahan di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 disusun dengan tujuan :

- a) Sebagai penjabaran Renstra Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029;
- b) Sebagai dasar penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang disertai dengan target indikator kinerja dan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026;
- c) Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan pada Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d) Sebagai alat evaluasi capaian kinerja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN	Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PUPRPRKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN LALU	Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Review terhadap RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Program dan Kegiatan.
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menjelaskan tentang Rencana Kerja terhadap Isu Strategis Nasional dan Dukungan terhadap Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
BAB 5 PENUTUP	

# BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA

---

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja dari Instansi Pemerintah guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target atau pun telah memenuhi target kinerja yang direncanakan sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja dari program/kegiatan;
2. Implikasi yang muncul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan yang perlu diambil dalam menanggapi faktor penyebab yang muncul.

Evaluasi Renja tahun 2025 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

### **2.1. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025**

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 adalah sebagaimana tabel terlampir. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Hasil Pelaksanaan Renja Tahun n-1**

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>80</b>	<b>34.612.268.042,-</b>		<b>1.415.451.660,-</b>		<b>4</b>	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersedia (Dokumen)	16	370.896.392,-	-	2.500.000,-	-	1	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	203.135.992,-	-	2.500.000,-		1	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	167.760.400,-	-	0		0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	80	26.074.361.931,-	-	6.792.937.344,-	-	26	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	192	26.026.362.666,-		6.792.937.344,-		26	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	47.999.265,-		0		0	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	80	42.917.302,-		820.000,-		2	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		42.917.302,00,-		820.000,-		2	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	suvey kepuasan pelayanan kepegawaian	80	56.000.000,00,-	-	0	-	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi			56.000.000,00,-		0		0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	80	716.185.419,-	-	35.419.250,-	-	5	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	49.945.116,-		0		0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	99.988.245,-		0		0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	97.664.682,-		0		0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	29.984.097,-		3.473.000,-		12	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	29.999.526,-		157.600,00,-		1	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	23.880.000,-		2.380.000,-		10	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	119.723.753,-		8.903.000,-		7	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	265.000.000,-		20.505.650,-		8	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Daerah Yang Memadai (Jenis)	80	424.152.978,-	-	0	-	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Paket)	1	74.239.242,-		0		0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	14	349.913.736,-		0	-	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	80	5.970.110.575,-	-	1.354.640.809,-	-	23	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan)	12	49.999.575,-		900.000,-		2	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	392.000.000,-		65.540.809,-		17	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	5.528.111.000,-		1.288.200.000,-		23	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	957.643.445,-	-	22.071.601,-	-	2	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	375.000.000,-		9.439.801,-		3	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	174.336.600,-		12.631.800,-		7	
Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	99.104.045,-		0		0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	309.202.800,-		0		0	
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>Persentase Peningkatan Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)</b>	<b>6,25</b>	<b>24.902.923.794,-</b>		<b>0</b>		<b>-</b>	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai dan Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi	0,60	8.763.840.600,-	7,06	0	-	0	
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	0,30	767.022.700,-	0,15	0		0	
Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang dioperasikan dan dipeliharakan							
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasikan/direstorasi (KM)	1,3	1.505.878.300,-	0,25	0		0	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun (Unit)	1	99.644.800,-	0,28	0		0	
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Sewaall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang dibangun		1.639.524.900,-		0		0	
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1	3.708.962.200,-	0,12	0		0	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir Lahar dan Pengamanan Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	2	856.888.500,-	0,30	0		0	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1	16.139.083.194,-	0,14	0		0	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Iriasi Permukaan yang dibangun	540	1.477.055.253,-	-	0	-	0	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	3,8	1.860.327.400,-	0,54	0		0	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (KM)	3	1.220.619.953,-	0,80	0		0	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun		871.260.600,-		0		0	
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara (KM)	3	273.002.400,-	1,75	0		0	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1	329.366.700,-	0,23	0	-	0	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak (%)</b>	<b>33.33</b>	329.366.700,-		0	-	0	
Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	2	230.010.400,-	-	0	-	0	
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM)		99.356.300,-		0		0	
<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)	2	65.857.600,-		0		-	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	<b>28.57</b>	65.857.600,-		0		0	
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan system pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	1	65.857.600,-	-	0	-	0	
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	Persentase rumah tangga yang besanitasi	6	8.053.592.600,-		17.262.175,-		-	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah	<b>333</b>	8.053.592.600,-		17.262.175,-		0	
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan system pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1665	7.776.915.600,-	-	17.262.175,-	-	2	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis system pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	276.677.000,-	-	0	-	0	
<b>Program Pengembangan Permukiman</b>	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara	100	<b>1.156.968.180,-</b>	-	0	-	-	
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan (Dokumen)	1	1.156.968.180,-		0	-	0	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provins	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	30	1.156.968.180,-	-	0	-	0	
<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara	100	<b>110.378.300,-</b>	-	0	-	-	
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan (Dokumen)	1	110.378.300,-		0	-	0	
Pembinaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	30	60.921.600,-	-	0	-	0	
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	7	49.456.700,-	-	0	-	0	
<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	Persentase Luas kawasan yang tertata	100	<b>266.993.600,-</b>	-	0	-	-	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya</i>	0.085	266.993.600,-	-	0	-	0	
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	<i>Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya</i>	0.085	266.993.600,-	-	0	-	0	
<b>Program Penyelenggaran Jalan</b>	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kabupaten/Kota)	1	<b>54.361.062.371,-</b>	-	258.837.107,-	-	-	
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)		54.361.062.371,-	-	258.837.107,-	-	<b>0</b>	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan (KM)		2.862.684.176,-	-	258.837.107,-	-	9	
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.3206	4.704.561.600,-	-	0	-	0	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)	839,41	30.398.768.845,-	-	0	-	0	
Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	7	12.884.903.142,-	-	0	-	0	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	0.9349	3.222.381.658,-	-	0	-	0	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Dokumen)	850,99	287.762.9500 ,-	-	0	-	0	
<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi</b>	2	<b>405.500.000,-</b>	-	0	-	-	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	"Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (%)	19,11	286.465.250,-	-	0	-	0	
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	30	286.465.250,-	-	0	-	0	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	30	119.034.750,-	-	0	-	0	
Peningkatan kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	30	119.034.750,-	-	22.679.647,-	-	19	
<b>Program Penyelenggaran Penataan Ruang</b>	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang	65	<b>1.721.339.900,-</b>	-	-	-	-	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)</b>	1	167.961.200,-	-	4.604.805,-	-	3	
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	2	167.961.200,-	-	4.604.805,-	-	3	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	1	145.981.500,-	-	880.000,-	-	1	
Peningkatan Kompetensi SDM bidang Penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	25	50.000.000,-	-	0	-	0	
Koordinasi Fasiltasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota (Berita Acara)	5	95.981.500,-	-	880.000,-	-	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi (Dokumen)	2	1.055.990.000 ,-	-	3.618.839,-	-	0	
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Laporan)	1	41.990.000,-	-	3.618.839,-	-	9	
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)	1	1.014.000.000,-	-	0	-	0	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provisi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (Dokumen)	3	351.407.200,-	-	13.576.003,-	-	4	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	1	33.994.500,-	-	0	-	0	
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	1	164.183.200,-	-	6.628.121,-	-	4	
Operasional Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1	153.229.500,-	-	6.947.882,-	-	5	
<b>Program Kawasan Permukiman</b>	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani (Persen)	2,7	<b>4.919.744.234,-</b>		2.963.600,-	-	-	
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)</i>	100	308.072.063,-	-	2.963.600,-	-	1	
Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dilaksanakan (%)	100	111.540.093,-	-	0	-	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	1,00	196.531.970,-	-	2.963.600,-	-	2	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10(sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Nilai kekumuhan (Dokumen)	1	4.611.672.171,-	-	0	-	0	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10(sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Rumah)	40	1.051.035.995,-	-	0	-	0	
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10(sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Unit)	30	2.505.690.846,-	-	0	-	0	
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10(sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan (Hektar)	2.8	1.054.945.330,-	-	0	-	0	
<b>Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum</b>	Presentase Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	40	<b>67.796.600,-</b>	-		-	-	
Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum diwilayah provinsi	<b>Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi (Dokumen)</b>	<b>1</b>	67.796.600,-,-		0		0	
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah (Dokumen)	1	67.796.600,-,-	-	0	-	0	
Program Penataangunaan Tanah	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi (Laporan)	1	<b>478.769.400,-</b>		1.250.000,-		-	
Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provnsi	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah (Dokumen)	1	478.769.400,-		1.250.000,-		0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	1	69.789.300,-		1.250.000,-		2	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	408.980.100,-		0		0	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Jumlah Laporan Penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan)	1	<b>869.274.458,-</b>	-	31.526.467,-	-	4	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Dinas PUPRPRKP) (Nilai)</b>	80	356.382.718,	-	3.047.350,-	-	1	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	48.668.725,00,-	-		-	0	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	64.713.993,-	-	200.000,-	-	0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	75.000.000,-	-		-	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	168.000.000,-	-	2.847.350,-	-	2	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	154.834.500,-	-	21.378.132,-	-	14	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	4.834.5000,-	-	200.000,-	-	4	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12	150.000.0000,-	-	21.178.132,-	-	14	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD (Dinas PUPR PRKP) (Nilai)	80	358.057.2400 ,-	-	7.100.985,-	-	2	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	161.512.900,-	-	7.100.985,-	-	4	

Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Out put)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	36.544.340,-	-	0	-	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	1	160.000.000,-	-	0	-	0	

**Tabel 2.2.**  
**Hasil Pelaksanaan Renja Tahun n-2**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	-	-	77.76	136,520,773,916	77.76	0.00
		Survey Kepuasan Payananaan Internal			80		80.00	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis (Dokumen)	16	522,522,690	16	402,287,030	100.00	154.13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	272,874,833.00	7	205,796,023.00	100.00	75.42
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	249,647,857.00	9	196,491,007.00	100.00	78.71
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	80	24,843,275,680	80	24,438,212,590	1,643.75	180.26
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	192	24,791,636,935.00	72	24,395,945,490.00	37.50	98.40
	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	51,638,745.00	65	42,267,100.00	3,250.00	81.85
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan administrasi barang milik daerah	80	74,987,300	80	74,555,200	100.00	99.42
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	74,987,300.00	2	74,555,200.00	100.00	99.42
4	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	suvey kepuasan pelayanan kepegawaian	80	80,000,000	80	38,201,800	100.00	47.75
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	5	80,000,000	5	38,201,800	100.00	47.75
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	80	783,303,734	80	598,621,800	100.00	488.87
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	49,955,328.00	1	17,339,310.00	100.00	34.71
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	99,997,014.00	1	68,421,000.00	100.00	68.42

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	97,669,206.00	1	53,845,500.00	100.00	55.13
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	29,987,538.00	1	18,669,500.00	100.00	62.26
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	31,818,372.00	1	15,146,290.00	100.00	47.60
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	23,880,000.00	1	14,280,000.00	100.00	59.80
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	99,996,276.00	12	60,955,500.00	100.00	60.96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	350,000,000.00	12	349,964,700.00	100.00	99.99
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	1,101,904,006	80	858,290,000	0.00	143.69
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Paket)	1	795,805,744	1	680,040,000	100.00	85.45
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	14	306,098,262	14	178,250,000	100.00	58.23
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	6,184,399,869	80	5,954,649,492	100.00	226.43
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	49,999,869.00	12	20,366,000.00	100.00	40.73
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	392,000,000.00	12	346,483,492.00	100.00	88.39
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	5,742,400,000.00	12	5,587,800,000.00	100.00	97.31
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	1,115,681,650	80	859,364,545	0.00	77.03
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	375,000,000	21	186,567,581	100.00	49.75

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
	Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	174,716,000	30	109,146,359	100.00	62.47
	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	199,996,500	2	199,286,594	100.00	99.65
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	365,969,150	1	364,364,011	100.00	99.56
Rata-rata capaian kinerja (%)							267.97	177.20
Predikat kinerja							SR	SR
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	35	38,790,544,059	-	-	0.00	0.00
1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi	0.60	18,170,459,988	7.06	16,888,888,002	1,176.67	92.95
	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	0.30	1,492,999,600	0.30	1,195,559,350	100.00	80.08
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasikan/direstorasi (KM)	1.3	1,535,572,200	1.30	1,456,353,000	100.00	94.84
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun (Unit)	1	3,997,891,800	1.00	3,811,449,830.00	100.00	95.34
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	1	95,996,280	1.00	44,727,180.00	100.00	46.59
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	10.5	4,457,652,900.00	10.50	4,091,614,467.00	100.00	91.79
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	2	5,313,985,100	2.00	5,086,245,000.00	100.00	95.71
	Penyusun Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	3	776,362,200	3.00	727,188,679.00	100.00	93.67
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	1	499,999,908	1.00	475,750,496.00	100.00	95.15

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
	Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)						
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola	540	20,588,084,071	4.15	19,504,344,777	0.77	94.74
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan (KM)	4.5	16,402,836,448.00	4.50	#####	100.00	94.88
	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	3.8	3,578,776,800.00	3.80	3,436,006,800.00	100.00	96.01
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (KM)	3	273,492,579.00	3.00	236,540,257.00	100.00	86.49
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara (KM)	3	243,152,444.00	3.00	228,312,070.00	100.00	93.90
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1	89,825,800	1.00	40,275,000	100.00	44.84
Rata-rata capaian kinerja (%)							588.72	93.84
Predikat kinerja							SR	SR
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (%)	33	609,998,400	-	91,162,900	0.00	14.94
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	2.00	609,998,400	-	498,769,828	0.00	81.77
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)	2	609,998,400	2	498,769,828	100.00	81.77
Rata-rata capaian kinerja (%)							0.00	81.77
Predikat kinerja							SR	SR
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan (%)	29	3,920,980,900	-	-	0.00	0.00
		Persentase rumah tangga yang besanitasi (%)	6.5	-	-	-	0.00	0.00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun (dokumen)	1.00	3,920,980,900	-	3,818,461,034	0.00	192.78
		Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah (KK)	153	-	-	-	0.00	192.78
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	153	3,545,987,600.00	153	3,461,628,092.00	100.00	97.62
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	374,993,300.00	1	356,832,942.00	100.00	95.16
Rata-rata capaian kinerja (%)							0.00	96.39
Predikat kinerja							SR	SR
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan gedung yang terseleenggara (%)	100.00	29,515,800	-	14,438,800	0.00	372.76
		Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan (%)	100.00	3,413,782,000	-	9,158,400	0.00	372.76
1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang diselenggarakan (Unit)	1.00	29,515,800	-	3,200,004,213	0.00	372.76
		Jumlah Perencanaan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang disiapkan (Dokumen)	1.00	3,413,782,000	-	-	0.00	372.76
	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang dikelola (Rumah Negara)	1	20,045,500.00	1	10,588,400	100.00	52.82
	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Bangunan Gedung Negara)	1	9,470,300.00	1	7,025,820	100.00	74.19
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Kabupaten/Kota)	7	80,361,500.00	7	51,799,580	100.00	64.46
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian	1	3,317,661,500.00	1	3,116,825,840	100.00	93.95

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
	untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategi Daerah Provinsi (Dokumen)						
	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategi Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif (Orang)	1	15,759,000.00	1	13,764,573	100.00	87.34
Rata-rata capaian kinerja (%)							0.00	302.88
Predikat kinerja							SR	SR
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)	22	219,462,500	-	127,393,400	0.00	58.05
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya (Ha)	5.00	1,149,796,700	-	127,393,400	0.00	11.08
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata (Kawasan)	3	172,617,300	3	101,880,000	100.00	59.02
	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)	1	20,738,300	1	13,811,100	100.00	66.60
	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kabupaten/Kota)	1	26,106,900	1	11,702,300	100.00	44.82
Rata-rata capaian kinerja (%)							0.00	11.08
Predikat kinerja							SR	SR
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	91.07	124,127,827,629	439.77	22,480,785,579	482.89	18.11
1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan (KM)	0.182	124,127,827,629	12.96	119,780,954,241	7,120.88	96.50
		Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeliharaan Jalan (KM)	99.82	124,127,827,629	130.31		130.54	0.00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
		Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan (M)	80	124,127,827,629	296.50		370.63	0.00
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (M)	3,035.72	2,890,088,659	3,035.72	2,624,308,754.00	100.00	90.80
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Km)	825.99	30,084,734,749	825.99	#####	100.00	94.73
	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	8	3,094,959,400	8	2,957,745,718.00	100.00	95.57
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	38.169	44,916,199,363	38.169	#####	100.00	97.23
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran menuju standar (Km)	6.153	41,430,646,058	6.153	#####	100.00	97.96
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	4	1,303,199,600	4	1,132,481,139.00	100.00	86.90
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2	407,999,800	2	308,845,204	100.00	75.70
Rata-rata capaian kinerja (%)							2,540.68	32.17
Predikat kinerja							SR	SR
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	36.56	461,350,116	51.48	77,661,912	140.81	16.83
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (%)	35.03	408,250,116	31.61	309,680,833	90.24	75.86
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (orang)	60	408,250,116	60.00	309,680,833	100.00	75.86
1	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (%)	55	126,812,060	72.43	117,373,519	131.69	92.56
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	126,812,060	30.00	117,373,519	100.00	92.56
Rata-rata capaian kinerja (%)							110.96	122.13
Predikat kinerja							SR	SR
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang (%)	86%	1,540,427,598	-	123,489,419	0.00	8.02

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	1	568,992,879	2.05	474,732,205	205.00	83.43
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	1	568,992,879	1	474,732,205	100.00	83.43
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (Dokumen)	1	221,998,909	65	44,905,434	6,537.00	20.23
	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat (Laporan)	1	-	1	-	100.00	#DIV/0!
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari (Dokumen)	1	79,970,634	1	44,905,434	100.00	56.15
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1	71,652,664	1.65	12,765,000	165.00	17.82
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1	43,490,000	1.00	12,765,000	100.00	29.35
	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah Layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1	-	1	-	100.00	#DIV/0!
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (Dokumen)	1	677,783,146	5.60	382,131,755	560.00	56.38
	Operasional Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	1	73,512,700	1.00	49,492,268.00	100.00	67.32
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	155,178,138	1.00	127,789,996.00	100.00	82.35
	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Jumlah Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	1	162,840,208	1.00	148,216,502.00	100.00	91.02

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1	65,800,000	1.00	56,632,989.00	100.00	86.07
Rata-rata capaian kinerja (%)							2,302.33	25.61
Predikat kinerja							SR	SR
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)	100	34,994,400	-	-	0.00	0.00
		Persentase pengembangan perumahan korban bencana atau relokasi program provinsi (%)	100	34,994,400	-	-	0.00	0.00
1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	1.00	-	-	-	0.00	#DIV/0!
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	-	-	-	0.00	#DIV/0!
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	-	-	-	0.00	#DIV/0!
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	1	-	-	-	0.00	#DIV/0!
1	Sosialisai dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Penyelenggaraan)	1.00	-	-	-	0.00	#DIV/0!
	Sosialisai Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	50	-	-	-	0.00	#DIV/0!
Rata-rata capaian kinerja (%)							0.00	#DIV/0!
Predikat kinerja							SR	SR
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan kawasan kumuh yang tertangani (%)	6	49,999,600	-	-	0.00	0.00
		Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan (%)	23	49,999,600	-	-	0.00	0.00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen, Laporan)	1	264,562,100	-	173,493,465	0.00	65.58
	Penyusun/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1	-	-	-	0.00	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Laporan)	2	264,562,100	2	173,493,465	100.00	65.58
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas )Ha	Persentase Luasan kawasan kumuh yang tertangani (%)	1	7,269,999,600	-	-	0.00	0.00
		Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan (%)	1	7,269,999,600	-	6,148,398,940	0.00	84.57
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit)	85	6,613,999,600	76	6,148,398,940	89.41	92.96
	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10( Sepuluh) Ha samapi degan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	2	-	-	-	0.00	#DIV/0!
Rata-rata capaian kinerja (%)							0.00	65.58
Predikat kinerja							SR	SR
12	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU (%)	100	#REF!	-	2,511,659,000	0.00	0.00
1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Dokumen)	4	3,185,040,800	-	2,511,659,000	0.00	78.86
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	3	3,185,040,800	-	2,511,659,000	0.00	78.86

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
		Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (Lokasi)						
13	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI,KUALIFIKASI,KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU	25	-	-	-	0.00	#DIV/0!
1	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Orang/Badan Hukum yang disertifikasi/diregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,sarana dan utilitas umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah (orang/badan hukum)	20	-	-	-	0.00	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah (Laporan)	1	-	-	-	0.00	#DIV/0!
Rata-rata capaian kinerja (%)							0.00	#DIV/0!
14	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTNGAN UMUM	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU (%)	30	35,997,800	-	-	0.00	0.00
1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	1	35,997,800	0.49	26,825,480	49.00	74.52
	Pemberitahuan,Pendataan Awal Lokasi,Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)	1	35,997,800	1.00	26,825,480	100.00	74.52
15	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan(%)	20	35,942,700	-	-	0.00	0.00
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	27,300,000	0.58	10,660,000	58.00	39.05

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	7	27,300,000	7.00	10,660,000	100.00	39.05
16	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	30	85,169,600	-	48,338,190	0.00	56.76
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1	85,169,600	-	51,513,842	200.00	60.48
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Dokumen)	1	35,889,400	1.00	23,912,657.00	100.00	66.63
	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan)	1	49,280,200	1.00	27,601,185.00	100.00	56.01
Rata-rata capaian kinerja (%)							102.33	58.02
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD)	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Dinas PUPRPRKP) (Nilai)	80			821,576,026		
		Nilai Sakip PD (dinas PUPR PRKP)	79.00			696,944,297.00		
		Survey Kepuasan Internal	80			683,598,797		
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Survey kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan (nilai)	80	164,962,200	23	124,631,729	0.00	75.55
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	24,994,900	10	13,345,500	0.00	53.39
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	49,967,300	8	39,926,745	0.00	79.91
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	24	26,000,000	0	7,387,000	0.00	28.41
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	64,000,000	36	63,972,484	0.00	99.96

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	80	142,998,000	-	100,578,817	0.00	70.34
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	2,998,000	36	2,840,000	100.00	94.73
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	140,000,000	24	97,738,817	100.00	69.81
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	80	247,469,720	43	185,577,467	0.00	74.99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	142,470,320	5	87,358,167	0.00	61.32
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	34,999,400	20	28,502,000	100.00	81.44
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	70,000,000	1	69,717,300	100.00	99.60
Rata-rata capaian kinerja (%)							0.00	0.00
Predikat kinerja							SR	SR

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dilakukan terhadap capaian indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penataan ruang, serta tata kelola pemerintahan.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap periode Renstra 2023–2026, dengan mempertimbangkan capaian kinerja fisik dan keuangan hingga tahun 2025 serta proyeksi tahun 2026. Selain itu, analisis ini juga memperhatikan arah kebijakan dan perubahan indikator kinerja pada Renstra periode 2025–2029 sebagai bagian dari proses transisi perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.4 Target dan Realisasi IKU 2023-2026

SASARAN/KI NERJA	INDIKATOR	DO	2023		2024		2025		2026	
			Rp		Rp		Rp		Rp	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	$X1/13+X2/13.....X13/13=....\%$	356.010.808.655	346.938.925.195	182.261.494.584	173.500.849.305	104.548.318.259.25	97.564.677.520	120.486.408.998.00	-
Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	1. Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang (IP) 2. Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal (IK)	1. $IP = ((A/B)+(C/D))/2$ A : Struktur Ruang Termanfaatkan B : Rencana Struktur Ruang C : Pola Ruang Termanfaatkan D : Rencana Pola Ruang  2. $IK = (IP + E)/2$ E : Hasil pengawasan Teknis (%)	2.125.860.200	1.873.443.200	1.270.951.959	992.873.716	421.913.200	245.950.414	142.000.000	-
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Perolehan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas oleh Inspektorat	35.545.260.558	33.720.255.887	34.535.497.677	33.224.181.807	32.450.724.130.50	29.515.579.419	350.000.000,00	-

SASARAN/KINERJA	INDIKATOR	DO	2023		2024		2025		2026	
			Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	$X1/13+X2/13.....X13/13=....\%$	18.9%	19.89%	29,8	29,25	29,41	29,47	53.30%	-
Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	1. Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang (IP) 2. Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal (IK)	1. $IP = ((A/B)+(C/D))/2$ A : Struktur Ruang Termanfaatkan B : Rencana Struktur Ruang C : Pola Ruang Termanfaatkan D : Rencana Pola Ruang  2. $IK = (IP + E)/2$ E : Hasil pengawasan Teknis (%)	0.6	0.6	0,65	0,65	0,7	0,7	0.75	-
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Perolehan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas oleh Inspektorat	75	77.81	80	76,65	80	79,45	81	-

Tabel 2.5 Tujuan, sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja 2026

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan rencana tata ruang	Indeks ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur	Indeks Ketahanan Air	3,55
				Indeks Ketersediaan Infrastruktur Keciptakarya	0,05
				Indeks Ketersediaan Infrastruktur Kebinamargaan	80,21
				Indeks Ketersediaan pembinaan Jasa Konstruksi	34,29
			Meningkatkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	55
				Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	35

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	
			serta perwujudan tertib tata ruang dan administrasi pertanahan		
			Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	36,37

### 2.2.1. Kinerja Sasaran Infrastruktur Pekerjaan Umum

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum menunjukkan tren yang relatif positif. Rasio ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum pada tahun 2023 telah melampaui target, yaitu sebesar 19,89% dari target 18,9%. Pada tahun 2024 capaian relatif mendekati target (29,25% dari target 29,8%), dan pada tahun 2025 kembali menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebesar 29,47% dari target 29,41%.

Secara umum, capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja dalam penyediaan infrastruktur dasar, meskipun peningkatannya cenderung moderat. Target tahun 2026 sebesar 53,30% menunjukkan adanya lompatan kinerja yang signifikan, sehingga memerlukan dukungan perencanaan dan penganggaran yang lebih optimal.

Dari sisi keuangan, realisasi anggaran pada sasaran ini menunjukkan tren penyerapan yang cukup baik, yaitu 97,45% pada tahun 2023, 95,19% pada tahun 2024, 93,33% pada tahun 2025

Meskipun demikian, terlihat adanya penurunan pagu anggaran dari tahun ke tahun, yang berpotensi mempengaruhi percepatan peningkatan ketersediaan infrastruktur.

### 2.2.2. Kinerja Sasaran Urusan Tata Ruang dan Pertanahan

Pada sasaran peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang, capaian indikator menunjukkan stabilitas yang cukup baik. Nilai indeks perencanaan tata ruang dan kepatuhan ruang secara konsisten mencapai target pada setiap tahun diantaranya: tahun 2023: 0,6 (target tercapai), tahun 2024: 0,65 (target tercapai), tahun 2025: 0,7 (target tercapai).

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian, dari sisi keuangan terlihat adanya penurunan signifikan pada alokasi anggaran, yang berimplikasi pada terbatasnya ruang intervensi program penataan ruang, khususnya dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Target tahun 2026 sebesar 0,75 menunjukkan upaya peningkatan kualitas tata ruang yang lebih tinggi, terutama dalam aspek implementasi dan pengawasan teknis.

### **2.2.3. Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah**

Kinerja tata kelola internal perangkat daerah yang diukur melalui nilai Reformasi Birokrasi menunjukkan tren yang cukup baik namun fluktuatif. Pada tahun 2023, capaian nilai RB melampaui target (77,81 dari target 75). Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 76,65 dari target 80. Pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 79,45, meskipun masih sedikit di bawah target.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan tata kelola pemerintahan telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan terutama pada aspek konsistensi implementasi reformasi birokrasi.

Dari sisi anggaran, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2026, yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program reformasi birokrasi.

### **2.2.4. Analisis Efektifitas Kinerja dan Keuangan**

Secara umum, kinerja pelayanan Dinas PUPRKP menunjukkan capaian yang cukup baik, yang tercermin dari tingginya tingkat realisasi keuangan yang secara konsisten berada di atas 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagian besar indikator kinerja juga telah memenuhi atau mendekati target yang ditentukan, sehingga menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Di sisi lain, efisiensi pelaksanaan program relatif terjaga meskipun terjadi tren penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam mendukung pencapaian kinerja. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Penurunan alokasi anggaran berpotensi menghambat pencapaian target kinerja jangka menengah, terutama pada program-program yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar seperti pembangunan infrastruktur. Selain itu, beberapa indikator kinerja, khususnya pada sektor infrastruktur, menunjukkan kecenderungan stagnasi yang mengindikasikan perlunya inovasi dan penguatan strategi pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas program dan kegiatan secara berkelanjutan guna memastikan tercapainya target kinerja tahun 2026 yang lebih tinggi dan optimal.

### **2.2.5. Analisis Transisi Indikator (Renstra 2023–2026 ke 2025–2029)**

Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPRKP periode 2025–2029, terjadi penyesuaian dan pengembangan struktur indikator kinerja yang lebih komprehensif serta berbasis pada pendekatan indeks sektoral. Perubahan ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas pengukuran kinerja yang tidak hanya

berorientasi pada aspek kuantitatif semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kualitas, keberlanjutan, dan dampak pembangunan.

Indikator kinerja yang sebelumnya menggunakan pendekatan tunggal, seperti rasio ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum, dikembangkan menjadi beberapa indikator turunan yang lebih spesifik dan representatif terhadap masing-masing urusan, antara lain meliputi Indeks Ketahanan Air, Indeks Ketersediaan Infrastruktur Keciptakarya, Indeks Ketersediaan Infrastruktur Kebinamargaan, serta Indeks Pembinaan Jasa Konstruksi. Pengembangan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap tingkat layanan infrastruktur secara sektoral.

Pada urusan penataan ruang, indikator kinerja juga mengalami penyempurnaan, yaitu melalui penggunaan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. Kedua indikator ini tidak hanya mengukur kualitas perencanaan, tetapi juga menekankan pada aspek implementasi, pengendalian, serta kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, diperkenalkan indikator baru berupa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Penambahan indikator ini menunjukkan adanya penguatan fokus pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar perumahan.

Secara konseptual, perubahan struktur indikator kinerja tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis keluaran (output) menuju pendekatan berbasis hasil (outcome) dan dampak (impact) yang lebih terukur dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun demikian, perubahan indikator kinerja ini berimplikasi pada keterbatasan dalam melakukan perbandingan secara langsung terhadap capaian kinerja periode sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap nilai dasar (baseline) serta penyempurnaan metodologi pengukuran kinerja, agar kesinambungan evaluasi kinerja antar periode perencanaan tetap dapat terjaga secara akuntabel dan terukur.

#### **2.2.6. Keterkaitan Kinerja dengan Target 2026**

Target kinerja tahun 2026 merupakan titik transisi antara Renstra lama dan Renstra baru. Beberapa indikator baru telah mulai diimplementasikan, dengan target antara lain:

- Indeks Ketahanan Air: 3,55
- Indeks Infrastruktur Kebinamargaan: 80,85
- Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang: 55
- Persentase akses hunian layak: 36,37%

Capaian kinerja pada periode sebelumnya menjadi dasar dalam penentuan target tersebut, meskipun diperlukan penguatan intervensi program untuk memastikan ketercapaian indikator yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Dinas PUPRPKP menunjukkan kecenderungan yang positif, yang tercermin dari capaian indikator kinerja yang relatif baik serta tingkat realisasi keuangan yang tinggi dan konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, serta perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan alokasi anggaran, peningkatan target kinerja yang semakin progresif, serta adanya perubahan struktur indikator kinerja pada periode perencanaan yang baru. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam pendekatan perencanaan dan pelaksanaan program agar tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika kebijakan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan efektivitas program dan kegiatan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, penguatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran guna menjamin konsistensi pencapaian target, serta penyesuaian strategi pencapaian kinerja yang berbasis pada indikator baru yang lebih komprehensif. Dengan demikian, diharapkan keberlanjutan kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dan penataan ruang dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut. Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, TUgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

## 2. Fungsi

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi tantangan yang memberikan dampak terhadap kurang optimalnya penyelenggaraan tugas kedinasan tersebut, diantaranya adalah

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang dapat menangani tugas teknis sesuai dengan kualifikasi dan *skill* yang dibutuhkan.
2. Keterbatasan prasarana dan sarana kerja dalam menunjang tugas teknis yang diberikan.
3. Tuntutan masyarakat akan pelayanan di bidang infrastruktur yang prima.
4. Defisit anggaran/pendanaan.
5. Keterlambatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari waktu yang telah ditentukan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanganan di bidang infrastruktur antara lain:

1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur baik di Kawasan Strategis Provinsi maupun di Kawasan Permukiman.
2. Belum tersedia bukti formal kepemilikan aset infrastruktur milik daerah seperti sertifikat tanah.

3. Pemetaan batas kewenangan penyelenggaraan infrastruktur sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penyelenggaraan infrastruktur di daerah usulan.
4. Kurang optimalnya penyediaan TPA/TPS/TPS-T yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luasan.
6. Keterbatasan masyarakat miskin atau yang memiliki penghasilan rendah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
7. Kerusakan lingkungan serta faktor alam yang menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan infrastruktur.

Dari analisis tantangan tersebut diatas dapat mengakibatkan dampak terhadap pendapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional. Sehingga dalam menyikapi tantangan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya semaksimal mungkin untuk optimalisasi sumber daya yang ada dalam paya meminimalkan tantangan yang ada agar menjadi peluang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Adapun peluang serta strategi dalam penyelesaian tersebut adalah:

1. Terbukanya peluang Kerjasama dengan berbagai pihak.
2. Terciptanya semangat kerja yang strategis.
3. Terciptanya tugas pokok dan fungsi yang strategis.
4. Pendanaan yang efektif dan efisien.
5. Pembaharuan peraturan-peraturan terkait dengan bidang infrastruktur.
6. Kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi terkini.
7. Pemetaan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
8. Perencanaan program dan kegiatan dengan yang berorientasi prioritas.
9. Peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur
10. Kepedulian pemerintah dan stakeholder terkait dalam pembangunan daerah.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuatkan formasi tentang program, kegiatan, kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, serta kerangka pendanaan.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan rencana pencapaian target kinerja Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait prioritas program/kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	8	9	
					DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN			89.600.741.997,92	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			89.360.741.997,92	
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			87.455.741.997,92	
1	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Dinas PUPR PRKP) Nilai Sakip PD (Dinas PUPR PRKP)	80 Nilai 81 Nilai	34.281.646.928,00	
	1	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis	7 7	350.000.000,00	
	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	150.000.000,00
	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	200.000.000,00
	1	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	80	26.913.235.928,00	
	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/ Bulan	26.878.235.928,00
	1	03	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00
	1	03	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan administrasi barang milik daerah	80	35.000.000,00	
	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	35.000.000,00
	1	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	survey kepuasan pelayanan kepegawaian	80	30.000.000,00	
	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	30.000.000,00
	1	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	80	535.000.000,00	
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000,00
	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.000.000,00
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00
	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00
	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00
	1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	75.000.000,00
	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000,00
	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	75.000.000,00
	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	75.000.000,00
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	5.783.411.000,00
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000,00
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000,00
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.403.411.000,00
	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	560.000.000,00
	1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	360.000.000,00
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	75.000.000,00
	1	03	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00
	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	18,89 %	7.000.000.000,00
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Air Baku Rasio Jaringan Irigasi Prosentase penurunan luas kawasan yang terdampak daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi	0,00060 0,56 0,24 %	2.400.000.000,00
	1	03	02	1.01	0132	Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipelihara	4,45 KM	2.100.000.000,00
	1	03	02	1.01	0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	300.000.000,00
	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola	360,59 Ha	4.600.000.000,00
	1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2,4 KM	4.000.000.000,00
	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 KM	400.000.000,00
	1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	200.000.000,00
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	0,237 % 25 % 29 %	50.000.000,00
	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah debit pelayanan SPAM jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	10 liter/detik 1 Dokumen 2 Penyelenggaraan	50.000.000,00
	1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9
							Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	7 Kabupaten/Kota	50.000.000,00
	1	03	03	1.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	0 Dokumen	0,00
4	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan	10 % 25 %	50.000.000,00
	1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun Jumlah infrastruktur persampahan yang tersedia Jumlah penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	0 Dokumen 1 Unit 0 Penyelenggaraan	50.000.000,00
	1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan			
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	50 Orang	50.000.000,00
5	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan Persentase rumah tangga yang besanitasi	27 % 6 %	2.570.000.000,00
	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air limbah	1 Dokumen 140 KK	2.570.000.000,00
	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	70.000.000,00
	1	03	05	1.01	0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	500 Orang	2.500.000.000,00
6	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	150.000.000,00
	1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	150.000.000,00
	1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat			
							Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	100 Orang	100.000.000,00
	1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			
							Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	7 Kabupaten/Kota	50.000.000,00
7	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	275.000.000,00
	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	275.000.000,00
	1	03	09	1.01	0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
							Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	210.000.000,00
	1	03	09	1.01	0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
							Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan	65.000.000,00
8	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	92,83 %	41.819.095.119,92
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil pemeliharaan Jalan Persentase jembatan dalam kondisi baik hasil pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan	1,76 1,057591746 0,82	41.819.095.119,92
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan			
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,71 KM	4.708.286.900,00
	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	850,99 KM	392.328.900,00
	1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	850,99 KM	31.633.755.001,20
	1	03	10	1.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	0,71 KM	1.772.703.962,00
	1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	183 (Jembatan) Meter	3.312.020.356,72
9	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	70,58 %	499.999.950,00
	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	"Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi "	82,80 %	362.000.050,00
	1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	30 Orang	362.000.050,00
	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	"Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi"	65	137.999.900,00
	1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	137.999.900,00
10	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang	88 %	760.000.000,00
	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000,00
	1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	2 Publikasi	150.000.000,00
	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	2 Dokumen	180.000.000,00
	1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25 Orang	90.000.000,00
	1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	6 Berita Acara	90.000.000,00
	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang	1	50.000.000,00
	1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	50.000.000,00
	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	3	380.000.000,00
	1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	60.000.000,00
	1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	160.000.000,00
	1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	160.000.000,00
11	1	04	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	31 % 6 %	1.905.000.000,00 1.905.000.000,00
	1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	2 Dokoumen,laporan,rumah,Ha	200.000.000,00
	1	04	03	1.01	0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	0,00
	1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	200.000.000,00
	1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Nilai kekumuhan	2 Dokumen, rumah, ha	1.705.000.000,00
	1	04	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan	1 Laporan	135.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9
			Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
1	04 03 1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	30 Unit Rumah	830.000.000,00
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki		
1	04 03 1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Hektar	740.000.000,00
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		240.000.000,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		240.000.000,00
12	2 10 03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Presentase Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	70.000.000,00
			50 %		
2	10 03 1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	70.000.000,00
			1		
2	10 03 1.01	0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	70.000.000,00
			1 Dokumen		
13	2 10 10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	170.000.000,00
			-		
2	10 10 1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	170.000.000,00
			-		
2	10 10 1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	70.000.000,00
			1 Laporan		
2	10 10 1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	100.000.000,00
			1 Dokumen		
				<b>J U M L A H</b>	<b>89.600.741.997,92</b>

## UPT Pengawasan dan Peralatan PUPR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	8	9
			UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR		500.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		500.000.000,00
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		500.000.000,00
1	1 03 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD)	500.000.000,00
			80 %		
1	03 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (UPTD)	145.000.000,00
			80		
1	03 01 1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.000.000,00
			1 Paket		
1	03 01 1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.000.000,00
			1 Paket		
1	03 01 1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00
			12 Laporan		
1	03 01 1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00
			12 Laporan		
1	03 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	153.000.000,00
			80		
1	03 01 1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
			12 Laporan		
1	03 01 1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150.000.000,00
			12 Laporan		
1	03 01 1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	202.000.000,00
			80		

1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	102.000.000,00
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	30.000.000,00
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00
<b>J U M L A H</b>								<b>500.000.000,00</b>

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi khususnya bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman adalah yang bersifat lintas batas kabupaten/kota. Penelaahan ini dilakukan dari awal kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dialokasi berdasarkan kewenangan. Berbagai usulan baik melalui jalur pokok pikiran maupun aspirasi masyarakat yang disampaikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah telah diverifikasi dan divalidasi, kemudian ditelaah usulan mana saja yang memenuhi kriteria dan dapat dimasukkan kedalam rencana kerja Dinas PUPRPRKP 2026

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
4	RUSDIANTO, S.I.Kom	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Pembangunan jalan provinsi dari simpang Badau menuju kecamatan Dendang karena terlalu sempit jalan sehingga rawan kecelakaan sepanjang 1,3 km	simpang Badau menuju kecamatan Dendang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1.3	km
12	RUSDIANTO, S.I.Kom	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Perlu Pembangunan Pelebaran jalan provinsi di Desa Nyuruk Kecamatan Dendang karena terlalu sempit sehingga rawan kecelakaan	Desa Nyuruk Kecamatan Dendang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	9	km
30	TAUFIK MARDIN	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Perlunya pelebaran jalan karena sempitnya jalan didepan SMAN 2 sehingga sering terjadinya kecelakaan	Depan SMAN 2 perawas, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Titik
31	MUHTAR	Masih belum tersedianya PSU Drainase Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi	Belum tersedianya sarana drainase jalan yang baik bagi masyarakat setempat khususnya di daerah Kampung Laut, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung 2°43'34.3"S 107°38'27.5"E, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	kilometer

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
33	TAUFIK MARDIN	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Akses menuju dermaga nelayan perlu perbaikan	Dermaga Baro kelurahan pangkallalang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Titik
42	TAUFIK MARDIN	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Seringnya terjadi banjir agar dibuatkan lanjutan drainase dinalan provinsi sepanjang kurang lebih 80 meter ke arah pasar baru	Pasar baru, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	80	Meter
46	TAUFIK MARDIN	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Seringnya terjadi banjir agar dibuatkan talud/drainase	Jl. Sudirman desa Aik Rayak, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Titik
52	TAUFIK MARDIN	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Akses jalan yang belum memadai sehingga perlu adanya pembuatan jalan dari kantor Desa Aik Rayak sampai Desa Danau Biru	Desa Aik Rayak, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1000	Meter
62	AGAM DLIYA UL-HAQ	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Permohonan untuk mengaspal jalan untuk masuk ke perkuburan kelurahan parit padang, karena tidak adanya akses jalan dan tempat khusus parkir yang memadai.	KELURAHAN PARIT PADANG, SUNGAILIAT, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	km
64	AGAM DLIYA UL-HAQ	Masih rendahnya layanan infrastuktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	Sering terjadinya banjir di RT. 05 Kelurahan Parit Padang tepatnya di depan RSJ, masyarakat berharap agar dapat dibuatkan talud diwilayah tersebut guna meminimalisir banjir.	KELURAHAN PARIT PADANG, SUNGAILIAT, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	5	Km
66	AGAM DLIYA UL-HAQ	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Banyaknya jalan disekitaran kelurahan parit padang yang kurang memadai (rusak), mohon sekiranya pemerintah daerah dapat merehab jalan tersebut.	KELURAHAN PARIT PADANG, SUNGAILIAT, Provinsi Bangka Belitung	Dibatalkan	3	Km
96	HERWANTO	Adanya Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang tidak mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Belum tersedianya sarana insentif di desa tersebut	Desa Bukit Terak Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung	Dibatalkan	1000000	Rupiah
98	HERWANTO	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan	Belum tersedianya sarana jalan yang baik bagi masyarakat desa tersebut	Desa Bukit Terak Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat,	Verifikasi Perangkat Daerah	32	KM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
		Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)		Provinsi Bangka Belitung			
103	HERWANTO	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU air minum	Belum tersedianya sarana Air yang bersih dan baik bagi masyarakat desa tersebut	Desa Air Limau Pal.9 Kecamatan Mentok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	Unit
105	HERWANTO	Rendahnya sistem jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dengan Kondisi Baik, dan fungsi pintu air/pintu klep kurang baik mengatasi kondisi air pasang saat musim hujan	Belum tersedianya sarana baik bagi masyarakat desa tersebut	Desa Air Limau Pal.9 Kecamatan Mentok Kab. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Unit
106	MONICA HAPRINDA, S.IP., M.Si	Masih rendahnya layanan infrastuktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	pembuatan tanggul	kecamatan rejosari, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	titik
109	MONICA HAPRINDA, S.IP., M.Si	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU persampahan	permohonan pembuatan penampungan sampah agar dpat dikelola dengan baik nanti guna menghindari terjadinya banjir setiap tahunnya	kelurahan bukit sari, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	tempat
110	MONICA HAPRINDA, S.IP., M.Si	Masih kurangnya ketersediaan sumber air baku Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun, baik untuk irigasi maupun untuk permukiman	permohonan pembangunan embung krena kurangnya penampungan air	kelurahan lontong pancur, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	titik
111	MONICA HAPRINDA, S.IP., M.Si	Masih kurangnya ketersediaan sumber air baku Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun, baik untuk irigasi maupun untuk permukiman	permohonan pembangunan embung karena terjadi banjir dikala hujan	kelurahan bukit sari, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	titik
117	AGAM DLIYA UL-HAQ	Masih adanya permukiman yang belum	Permohonan pembuatan siring jalan Dusun di	Dusun Riding Panjang, Air Dayung, Tebing Tinggi	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
		terfasilitasi PSU drainase	Dusun Riding Panjang, Air Dayung, Tebing Tinggi	Kecamatan Merawang, Provinsi Bangka Belitung			
126	ARBIYANTO	Adanya kebutuhan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Belum tersedianya sarana tempat olahraga yang baik bagi masyarakat Desa setempat	Desa Bukit Terak Kec. Simpang Teritip, Provinsi Bangka Belitung	Dibatalkan	3	Unit
141	SYARIFAH AMELIA	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Kondisi jalan yang saat ini kurang memadai di wilayah Selat Nasik dan Suak Gual seringkali menyulitkan mobilitas warga, pengiriman barang, serta akses ke fasilitas publik	Desa Selat Nasik, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	KM
150	SYARIFAH AMELIA	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai di pulau-pulau kecil berpenghuni	Desa Selat Nasik merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir pantai Provinsi Bangka Belitung yang mengalami ancaman abrasi yang semakin parah. Abrasi pantai ini mengancam lingkungan, infrastruktur, dan sumber daya alam yang ada di sekitar desa. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang serius untuk membangun talud pantai yang dapat menahan laju abrasi serta melindungi aset yang ada di kawasan tersebut.	Desa Selat Nasik, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	3	KM
152	PAHLIVI, S.Pi	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Para masyarakat Desa Belilik berharap adanya pembangunan sering atau talud di depan masjid desa belilik, karena hari hujan banyak rumah yang terendam banjir	JL. Raya Desa Belilik Kecamatan Namang Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	KM
155	PAHLIVI, S.Pi	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	perbaikan jalan dan perbaikan sering guna menghambat tergenangnya air yang tumpah yang tidak pada jalur pembuangannya di sepanjang jalan Namang dan Belilik	Jl. Raya Desa Namang dan Desa Belilik Kecamatan Namang Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	KM
177	SYARIFAH AMELIA	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai di pulau-pulau kecil berpenghuni	Masyarakat pulau Gersik meminta pembangunan talud pemecah ombak dikarenakan bibir pantai dan rumah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai sudah banyak yang hancur tergerus abrasi akibat ombak	Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	KM
182	SYARIFAH AMELIA	Diperlukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kepala Desa jangkang meminta perbaikan jalan sepanjang desa Jangkang- desa kemiri- desa balok - desa air	Desa Jangkang, Kecamatan Dendang , Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	KM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
		Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	asam karena pada saat ini sepanjang jalan tersebut terdapat banyak lobang dan keadaan jalan yang sudah tidak layak				
183	SYARIFAH AMELIA	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Masyarakat Desa Balok meminta pelebaran jalan dikarenakan jalan desa saat ini masih belum layak dan memenuhi standar	Desa Balok, Kecamatan Dendang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	5	KM
188	MONICA HAPRINDA, S.IP., M.Si	Masih rendahnya layanan infrastruktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	pengerukan bandar karena sering terjadi banjir	kelurahan lontong pancur, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	500	m
190	UCOK OKTAHABER, S.H., M.H	Masih rendahnya layanan infrastruktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	Tidak ada gorong gorong sehingga air tumpah langsung ke pemukiman warga	Jl timah 1 kelurahan opas indah, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	500	Meter
191	MONICA HAPRINDA, S.IP., M.Si	Masih rendahnya layanan infrastruktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	pengerukan bandar	kelurahan bukit sari, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	500	meter
193	MONICA HAPRINDA, S.IP., M.Si	Masih rendahnya layanan infrastruktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	usulan untuk pembukaan lahan 300 m untuk membuka saluran air	kelurahan lontong pancur, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	300	meter
231	MARYAM, S.H	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Kondisi sarana jalan menuju ke sekolah yang rusak dan seringkali membahayakan keselamatan, baik untuk para siswa/siswi, guru, maupun para orang tua/wali murid pengantar, terutama saat datangnya musim hujan.	SMA Negeri 1 Belinyu di Jl. Mayor Syafrie Rachman No. 17, Kuto Panji, Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung	Dibatalkan	500	Meter
249	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Diperlukan Operasional	kondisi mushola rusak dan kecil. jalan aspal rusak,	jalan transmigrasi desa tanah bawah	Pengajuan Usulan	1	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
		dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	tidak ada siring jalan, belum ada lampu jalan	kecamatan puding besar, Provinsi Bangka Belitung			
250	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Diperlukan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	kondisi jalan rusak serta lahan dan rumah berada di eks jaringan listrik	perumahan mantung Kecamatan Belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	paket
264	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih kurangnya ketersediaan sumber air baku Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun, baik untuk irigasi maupun untuk permukiman	belum ada sumber air bersih warga, perlu bangun embung baru	kawasan hutan produksi desa bintet kecamatan belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	paket
265	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU penerangan jalan umum	jalan gelap tidak ada penerangan, perlu penerangan jalan umum	desa riding panjang kecamatan belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	50	titik
268	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih rendahnya layanan infrastuktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	sering terjadi banjir, perlu peninggian badan jalan tinggi 1 meter diatas aspal	sungai jeruk desa labu kecamatan puding besar, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	350	meter
269	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	saluran air tidak ada, jalan rusak dan sempit. perlu peningkatan (aspal) jalan beserta bahu jalan, siring dan drainase	simpang 3 ke polsek RT 3 dusun 5 desa puding besar kecamatan puding besar, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	300	meter
270	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	jalan tanah, perlu pengaspalan dan siring jalan lingkar	desa puding besar kecamatan puding besar, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	6	km
271	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	jalan tanah, perlu pengaspalan jalan dan siring jalan TMMD	arah jalan balun ijuk. Desa puding besar kecamatan puding besar, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	20	KM
274	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	jalan sempit dan belum standar, perlu pelebaran dan bahu jalan	jalan saing kecamatan puding besar, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	4	km

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
275	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU penerangan jalan umum	jalan gelap tidak ada penerangan, perlu pengadaan lampu jalan	jalan saing kecamatan puding besar, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	20	titik
276	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	jalan rusak dan sempit, perlu pengaspalan jalan ke sungai dua	jalan saing kecamatan puding besar, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	3	km
277	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih rendahnya layanan infrastruktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	jembatan ambruk, tidak bisa lewat mobil, hanya motor. perlu rehabilitasi jembatan air asam	kelurahan air asam kecamatan belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	paket
278	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	jalan kondisi rusak, perlu rehab dari simpang mantung ke pelabuhan	perumahan mantung kecamatan belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	3	KM
279	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	tidak ada saluran air, perlu pembuatan talud sekaligus sebagai batas perbatasan	RW 3 desa air asam kecamatan belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	paket
280	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	jalan tanah belum aspal	kampung bantam desa bintet kecamatan belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	4	KM
281	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai di pulau-pulau kecil berpenghuni	terjadi abrasi, perlu pembuatan pemecah ombak	desa bintet kecamatan belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	kawasan
282	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	kondisi plat dekker sempit, sementara pemakai jalan ramai	Desa riding panjang kecamatan belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	paket
283	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	kondisi jalan sempit menuju RS Eko Maulana Ali	RS Eko Maulana Ali Kecamatan Belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	paket
284	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	belum diaspal, jalan rusak sering terjadi kecelakaan	jalan bukit tulang, kumpai, kelapo hutan dan mengkubung desa riding panjang kecamatan belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	8	KM
285	IMAM WAHYUDI, S.IP., MH	Kinerja kelembagaan pengelolaan persampahan di kabupaten/kota	kantor dan fasilitas TPA belum ada listrik, perlu pengadaan jaringan listrik untuk TPA Belinyu	TPA Belinyu Kecamatan Belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
		belum profesional dan sehat					
288	EDI NASAPTA, S.M	Rendahnya ketersediaan sumber air untuk irigasi (kondisi air di embung eksisting menyusut, serta sumber air yang berasal dari sungai mengalami pasang surut dan sedimentasi)	Sungai mengalami sedimentasi/pendangkalan	Dusun Kelekek Usang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Titik
289	EDI NASAPTA, S.M	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Bantuan hibah jalan karena jalan masih bersertifikat SMAN 2 Tanjung Pandan	SMAN2 Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Titik
291	EDI NASAPTA, S.M	Adanya Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang tidak mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Mempertanyakan Kapan Pemberian Insentif Lembaga Adat diadakan kembali	Desa Perawas, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Titik
292	EDI NASAPTA, S.M	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Seringnya terjadi kecelakaan karena sempitnya jalan	Di depan SMAN 2 Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Titik
302	HERYAWANDI, SE	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Kondisi jalan yang sempit dan rusak di Kawasan Dusun Bubung Tujuh Desa Sangku dan merupakan jalan utama akses ke SMAN 1 Tempilang	Dusun Bubung Tujuh Desa Sangku Kecamatan Tempilang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	KM
303	HERYAWANDI, SE	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Jalan yang rusak dan sempit di ruas jalan Kotawaringin-Tempilang	Ruas Jalan Desa Kotawaringin-Tempilang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	KM
307	HERYAWANDI, SE	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum	Perawatan Jalan Berkala di Ruas Jalan Sangku-Simpang Tempilang	Ruas Jalan Sangku-Simpang Tempilang Kecamatan Tempilang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	20	KM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
		standar (+/- 70%)					
343	MARYAM, S.H	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Kondisi sarana jalan akses masuk menuju ke sekolah yang rusak dan seringkali membahayakan keselamatan, baik untuk para siswa/siswi, guru, maupun para orang tua/wali murid pengantar, terutama saat datangnya musim hujan.	SMA Negeri 1 Belinyu di Jl. Mayor Syafrie Rachman No. 17, Kuto Panji, Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	500	Meter
353	dr. ADI SUCIPTO, Sp.B	Adanya kebutuhan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pinjam pakai gedung milik pemerintah provinsi untuk SMK Penerbangan	Jalan Raya Pasir Padi, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	unit
373	EDI NASAPTA, S.M	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	Seringnyanya terjadi banjir	RT. 39 Desa Aik Rayak, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Titik
375	EDI NASAPTA, S.M	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	Seringnya terjadi banjir	Jl. Sudirman Desa Aik Rayak, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Titik
378	EDI NASAPTA, S.M	Rendahnya ketersediaan sumber air untuk irigasi (kondisi air di embung eksisting menyusut, serta sumber air yang berasal dari sungai mengalami pasang surut dan sedimentasi)	Adanya pendangkalan jembatan	Desa Aik Rayak, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Titik
379	EDI NASAPTA, S.M	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Akses jalan yang belum memadai	Desa Aik Rayak, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1000	meter
399	RINA TAROL, SE	Rendahnya sistem jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dengan Kondisi Baik, dan fungsi pintu air/pintu klep kurang baik mengatasi kondisi air pasang saat musim hujan	Rehabilitasi Tanggul Air di desa rias	desa rias, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	100	hektar
412	ME HOA, S.H., M.H	Masih belum tersedianya PSU Jaringan	Belum tersedianya air Bersih	Desa Baskara Bakti, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	3	unit

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
		Perpipaan Air Bersih di Kawasan Kumuh Provinsi					
422	ME HOA, S.H., M.H	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Belum ada Siring di Jalan Raya Menuju Desa Sungkap	Desa Namang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	KM
424	ME HOA, S.H., M.H	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Belum ada Siring di RT.03 dan 04	Desa Baskara Bakti, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	KM
425	ME HOA, S.H., M.H	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Banyak jalan yang rusak Di jalan Desa Rt. 01 sehingga diperlukan siring	desa Cambai Selatan, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	500	KM
426	ME HOA, S.H., M.H	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	karena belum adanya drainase perbatasan kota/kabupaten sampai masjid slsabilah	Desa Mangkol, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	200	M
428	DIDIT SRI GUSJAYA, SH., MH	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Jalan menuju SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sudah banyak yang berlubang dan tidak rata serta kurang lebar sehingga potensi kecelakaan meningkat	Jalan SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	km
431	DIDIT SRI GUSJAYA, SH., MH	Adanya kebutuhan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terdapat beberapa titik gedung dan kelas yang bocor pada SMK Negeri 1 Pangkalan Baru sehingga berpotensi mengganggu proses belajar mengajar	SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	paket
432	DIDIT SRI GUSJAYA, SH., MH	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Jalan menuju kolam renang dari SMK Negeri 1 Pangkalan Baru sudah berlubang dan tidak rata sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan	SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	km
434	DIDIT SRI GUSJAYA, SH., MH	Adanya kebutuhan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	bangunan tempat tinggal para santri Pesantren Hidayatullah Desa Teru Kabupaten Bangka Tengah sudah kurang layak huni sehingga mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar	Pesantren Hidayatullah Desa Teru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	unit

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
452	LEVIYAN, A.Md	Masih banyaknya keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh kewenangan provinsi	Rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu	Desa Belo Laut , Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	Unit
453	LEVIYAN, A.Md	Masih kurangnya tingkat kepemilikan prasarana jamban sehat berikut tanki septik yang kedap di masyarakat	Kepemilikan jamban bersih yg masih kurang	Desa Belo Laut , Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	Unit
460	LEVIYAN, A.Md	Rendahnya ketersediaan sumber air untuk irigasi (kondisi air di embung eksisting menyusut, serta sumber air yang berasal dari sungai mengalami pasang surut dan sedimentasi)	Menumpuk nya material pasir membuat sungai menjadi dangkal dan menyebabkan banjir	Kelurahan Sungai Baru , Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket
461	LEVIYAN, A.Md	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	Belum ada drainase di sepanjang jalan Belo Laut	Desa Belo Laut , Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	3	Km
467	IMELDA, S.A.P	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Peningkatan jalan antara dusun limbung desa jada bahrin ke desa kimak sepanjang 4 km kepada Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;	Desa Jade Bahrin Kecamatan Merawang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	4	KM
470	IMELDA, S.A.P	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Peningkatan jalan perkubur desa balunujuk 1 km kepada Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	KM
472	IMELDA, S.A.P	Masih kurangnya ketersediaan sumber air baku Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun, baik untuk irigasi maupun untuk permukiman	Pembangunan irigasi dan talud persawahan desa balunujuk kepada Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
476	IMELDA, S.A.P	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Pengajuan Berem desa balunujuk kepada Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;	Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket
477	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	dikarenakan sering terjadi banjir	desa air durin kec. pemali, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	100	meter
478	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Masih banyaknya keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh kewenangan provinsi	dibutuhkan pembangunan rumah layak huni	kelurahan kenanga kec. sungailiat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	unit
486	EDDY ISKANDAR, S.Ag	Masih rendahnya layanan infrastuktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	Kurangnya Penanganan Banjir di wilayah Pangkalpinang yang menjadi kewenangan Provinsi khususnya di Kelurahan Rejosari Kecamatan Gabek Pangkalpinang	Kelurahan Rejosari Kecamatan Gabek, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10000	meter
490	SADIRI	Masih rendahnya layanan infrastuktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	permohonan pembangunan selokan/bandar di wilayah RT 7 Kel. Sriwijaya karena mengalami kerusakan, sehingga harus segera diperbaiki untuk mengantisipasi terjadinya banjir	di RT 7 Kelurahan Sriwijaya, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	km
495	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Masih belum tersedianya PSU Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi	jalan tersebut kondisi rusak mengakibatkan sering terjadi kecelakaan	Perumahan mantung belinyu kec. belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	3	KM
496	EDDY ISKANDAR, S.Ag	Diperlukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kondisi Jembatan dan Saluran yang kecil, menghambat saluran sehingga menyebabkan banjir	Kampung Opas Kecamatan Pangkalbalam dan Kelurahan Rejosari Kecamatan Gabek, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	500	meter
497	SESILIA RIZKI, S.Sos	Adanya kebutuhan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	permohonan untuk dibangunnya balai latihan kerja	kecamatan sungailiat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	unit

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
502	EDDY ISKANDAR, S.Ag	Masih kurangnya ketersediaan sumber air baku Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun, baik untuk irigasi maupun untuk permukiman	Banjir yang terjadi juga disebabkan aliran air yang datang dari wilayah disekitar pangkalpinang secara serentak.	Kelurahan Paritlalang Kecamatan Rangkui, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	5000	meter
504	H. MULYADI, S.E	Masih kurangnya ketersediaan sumber air baku Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun, baik untuk irigasi maupun untuk permukiman	sumur BOR warga umum di dusun Rekrek sering macet hingga kering	Dusun Rekrek, Desa Munggu, Kecamatan Sungaiselan, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket
508	EDDY ISKANDAR, S.Ag	Rendahnya ketersediaan sumber air untuk irigasi (kondisi air di embung eksisting menyusut, serta sumber air yang berasal dari sungai mengalami pasang surut dan sedimentasi)	Perlu di bangun embung sebagai tangkap air	Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10000	meter
509	TAUFIK RIZANI, A.Md	Rendahnya ketersediaan sumber air untuk irigasi (kondisi air di embung eksisting menyusut, serta sumber air yang berasal dari sungai mengalami pasang surut dan sedimentasi)	Banyak DAS di kabupaten belitung yang sudah dangkal dan tidak mapu menampung debit air ang banyak sehingga menyebabkan air meluap dan menggenangi pemukiman warga	Desa Badau, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	paket
513	SADIRI	Masih banyaknya keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh kewenangan provinsi	Permohonan bantuan RTLH diwilayah Kelurahan Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang,	Kelurahan Sriwijaya, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	30	unit

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
515	SADIRI	Masih banyaknya keluarga yang belum memiliki rumah pada kawasan kumuh kewenangan provinsi	Permohonan Bantuan Rumah Layak Huni di Wilayah Kelurahan Semabung.	Kelurahan Semabung Baru Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	Unit
517	TAUFIK RIZANI, A.Md	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	masih banyak terdapat jalan yang rusak dan belum diperbaiki secara keseluruhan, Masyarakat meminta pemerintah untuk melanjutkan program Pelebaran jalan diruas jalan Badau - Dendang	Desa Badau - Dendang , Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	km
518	EDDY ISKANDAR, S.Ag	Masih belum tersedianya PSU Pengolahan persampahan di Kawasan Kumuh Provinsi	Perlunya penanganan sampah di Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	paket
523	TAUFIK RIZANI, A.Md	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Usia jalan pasar kampit yang sudah lebih dari 30 tahun, sehingga sudah sangat layak untuk dilakukan perbaikan dan pelebaran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Pasar Kampit Kecamatan Kampit, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1	km
528	H. ZEKI YAMANI, S.H., M.H	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai di pulau-pulau kecil berpenghuni	Pembangunan Talud Pantai Pukan dan Koala	Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	unit
536	TAUFIK RIZANI, A.Md	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Tahun 2024 baru dilakukan pelebaran kurang lebih 1 km, diharapkan bisa dilanjutkan kurang lebih 1.5 km	Desa Kampung Bali Kecamatan Sijuk, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	1.5	km
546	H. ZEKI YAMANI, S.H., M.H	Masih rendahnya layanan infrastuktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	Banjir terus-menerus pada saat musim hujan	Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	unit
550	H. ZEKI YAMANI, S.H., M.H	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU persampahan	Kurangnya Mobil pengangkut sampah	Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	unit
561	EDDY ISKANDAR, S.Ag	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	masih ada jalan di kelurahan jembatan gantung yang belum diaspal	Kelurahan jerambah gantung kecamatan gabek, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	3	km

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
563	TAUFIK RIZANI, A.Md	Masih kurangnya tingkat kepemilikan prasarana jamban sehat berikut tanki septik yang kedap di masyarakat	di Kabupaten Belitung masih sangat membutuhkan bantuan wc dari Pemerintah agar terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih	Tanjung Binga, Provinsi Bangka Belitung	Pengajuan Usulan	100	UNIT
564	H. KASBIRANSYAH, S.E.I	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Perbaikan Drainase / Saluran Jalan , melakukan Pedalaman pada drainase	Simpang Empat Dusun Mempiu, Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	300	m
573	H. KASBIRANSYAH, S.E.I	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Peningkatan Jalan / Pelebaran Jalan ( Jalan Terlalu Sempit dan bolong dan rusak)	Ruas Jalan Dendang Simpang Pesak Kab Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	km
574	MAISINUN	Masih rendahnya layanan infrastruktur pengendali daya rusak air, khususnya penanganan banjir di kawasan permukiman	PERLU ADANYA PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMUKIMAN	DESA BATU PENYU, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	100	METER
580	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU penerangan jalan umum	Kurangnya penerangan di desa tersebut	Desa Riding Panjang Kec. Belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	50	titik
581	MAISINUN	Diperlukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	AGAR DILAKUKAN PENGASPALAN JALAN PERBAIKAN DARI DUSUN LIDUN SAMPAI KE DESA LIMBONGAN	DESA BATU PENYU, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	15	KM
587	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	kurang nya Penerangan di jalan utama	Desa Riding Panjang Kec. Belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	30	titik
598	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni terutama bagi Orang Asli Pedalaman (OAP) di daerah terisolasi,	Kurangnya fasilitas rumah untuk masyarakat yang kurang mampu	Desa Saing Kec. Puding Besar, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	20	unit

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
		terpencil, dan terluar					
604	YOGI MAULANA	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Belum tersedianya sarana jalan yang baik bagi masyarakat desa Sebagin	Desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	km
608	YOGI MAULANA	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU penerangan jalan umum	Belum tersedianya sarana penerangan jalan yang baik bagi masyarakat desa Sebagin	Desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	50	unit
609	BELIADI, S.IP	Diperlukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	AGAR DILAKUKAN PENGASPALAN JALAN PERBAIKAN DARI DUSUN LIDUN SAMPAI KE DESA LIMBONGAN	DESA BATU PENYU, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	15	KM
611	BOBBY PRIMA SANDY MUSLIM, S.Ds	Diperlukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	belum layak akses jalan utama di sekitar lapangan bola desa pusuk sampai ke rt.03	desa pusuk kecamatan kelapa kabupaten bangka barat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	4	km
616	BOBBY PRIMA SANDY MUSLIM, S.Ds	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU penerangan jalan umum	belum adanya penerangan lampu jalan di sepanjang desa beruas sampai desa pusuk	desa pusuk kecamatan kelapa kabupaten bangka barat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	km
619	BOBBY PRIMA SANDY MUSLIM, S.Ds	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU penerangan jalan umum	belum adanya penerangan lampu jalan di sepanjang jalan desa kelapa sampai desa yul	desa tebing kecamatan kelapa kabupaten bangka barat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	km
623	YOGI MAULANA	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU penerangan jalan umum	Bantuan Penerang atau Lampu Jalan Di Desa Simpang Rimba	Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	70	Paket
627	BOBBY PRIMA SANDY MUSLIM, S.Ds	Masih kurangnya ketersediaan sumber air baku Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun, baik untuk irigasi	kurangnya sarana dan prasarana pengadaan tedmon air untuk menampung air dipuskesmas desa pusuk	desa pusuk kecamatan kelapa kabupaten bangka barat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	unit

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
		maupun untuk permukiman					
628	YOGI MAULANA	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Belum tersedianya sarana jalan yang baik bagi masyarakat desa Simpang Rimba	Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	km
631	YOGI MAULANA	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	Perbaiki jalan rusak di Desa Nyelanding	Desa Nyelanding, Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	5	km
633	MAISINUN	Adanya kebutuhan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PERLU ADANYA BALAI ATAU GEDUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KHUSUS LADA DAN SAWIT	DESA MENTAWAK, Provinsi Bangka Belitung	Dibatalkan	2	UNIT
637	ZAINUDIN, A.Md	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai di pulau-pulau kecil berpenghuni	Bantuan Pemecah Ombak di Sepanjang Pantai Penyak	Desa Penyak Kecamatan Koba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	3	KM
638	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Adanya kebutuhan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Permohonan perbaikan kantor lurah yang sudah rusak	Kel. Air Asam Kec.Belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	paket
640	JOHAN VIGARIO, S.E	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Jalan ke Dermaga Jurex yang sudah rusak parah	Desa Tuik Kecamatan Kelapa, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	5	km
641	YOGI MAULANA	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai di pulau-pulau kecil berpenghuni	Bantuan untuk Pemasangan Pemecah Ombak (Breakwater)	Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	km
642	JOHAN VIGARIO, S.E	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	PERBAIKAN JALAN KE DERMAGA JUREK YANG MEMPRIHATIKAN	JALAN DERMAGA JUREK, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	5	KM
646	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Masih belum tersedianya PSU Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi	jalan rusak, belum pernah diaspal sering terjadi kecelakaan	bukit tulang,kumpai, kelapohutan dan menghubungkan rinding panjang kc. belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
649	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	bantuan pelebaran jalan karena kondisi sempit menuju rmh sakit eko maulana ali belinyu	Rs. Eko maulana ali kec. belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	paket
650	JOHAN VIGARIO, S.E	Diperlukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Perbaikan IPAL yang rusak dan tidak dilakukan pemeliharaan dari pembangunan hingga sekarang	Desa Belo laut Kecamatan Muntok, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	paket
652	YOGI MAULANA	Diperlukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Bantuan Perbaikan Siring atau Bandar	Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	5	km
653	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	pelebaran plat dekker krn kondisi sempit dan jalan akses masyarakat	desa riding panjang kec. belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	paket
654	YOGI MAULANA	Diperlukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Bantuan Perbaikan Siring atau Bandar	Desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	5	km
664	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Masih kurangnya ketersediaan sumber air baku Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun, baik untuk irigasi maupun untuk permukiman	belum ada sumber air bersih	belum ada sumber air bersih, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Meter kubik
665	JOHAN VIGARIO, S.E	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	KURANGNYA LAMPU PENERANGAN JALAN DAN PRASARANA FASILITAS JALAN	DESA BELO LAUT, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	50	BUAH
675	JOHAN VIGARIO, S.E	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	MENUMPUKNYA MATERIAL PASIR YANG BERASAL DARI BAGIAN DEPAN MUARA SUNGAI SEHINGGA MEMBUAT SUNGAI SEMAKIN	DESA AIR LIMAU, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
			DANGKAL DAN HAMPIR MENGENAI BADAN JALAN				
677	BOBBY PRIMA SANDY MUSLIM, S.Ds	Adanya kebutuhan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	belum adanya gedung posyandu di desa pusuk karena masih menumpang di gedung TPA	desa pusuk kecamatan kelapa kabupaten bangka barat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	usulan
679	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., MH	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai di pulau-pulau kecil berpenghuni	karena sering terjadi abrasi pantai	Desa Bintet Kec. Belinyu, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1	paket
680	JOHAN VIGARIO, S.E	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	KONDISI JALAN YANG SUDAH RUSAK DAN BERLOBANG SERING MENYEBABKAN KECELAKAAN	PAL 3 KECAMATAN MENTOK, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	3	KM
685	JOHAN VIGARIO, S.E	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	BELUM ADA SHIRING DISEPANJANG JALAN RAYA KELAPA	DESA KALAPA, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	KM
690	YOGI MAULANA	Pembangunan infrastruktur pengaman pantai di pulau-pulau kecil berpenghuni	Bantuan Untuk Pembangunan Talud	desa sebagian kec. simpang rimba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	unit
694	ZAINUDIN, A.Md	Lebar Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum standar (+/- 70%)	bantuan pengaspalan jalan di Desa perlang	Desa Perlang Kecamatan Koba, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	2	KM
696	BOBBY PRIMA SANDY MUSLIM, S.Ds	Diperlukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	mohon perbaikan jalan dan perluasan jalan dari rumah bapak kades sampai RT.06 desa tebing	desa tebing kecamatan kelapa kabupaten bangka barat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	3	km
697	BOBBY PRIMA SANDY MUSLIM, S.Ds	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU penerangan jalan umum	pengadaan tiang listrik karena banyaknya kondisi kabel listrik yang berantakan dan berbahaya saat musim hujan di desa pusuk	desa pusuk kecamatan kelapa kabupaten bangka barat, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	4	unit
698	JOHAN VIGARIO, S.E	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	belum ada pembangunan drainase di sepanjang jalan raya Kelapa	Kelapa, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	1.3	km
700	JOHAN VIGARIO, S.E	Masih kurangnya tingkat kepemilikan prasarana	masih banyak yang belum memiliki wa bersuh	Desa Air Bulin kecamatan Kelapa, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	41	UNIT

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN
		jamban sehat berikut tanki septik yang kedap di masyarakat					
728	ELVI DIANA, S.E., M.M	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	Sering banjir dan mampet	KP. TEGAL REJO KEL. SUNGAI BARU KEC. MENTOK KAB. BANGKA BARAT , Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	500	meter
729	ELVI DIANA, S.E., M.M	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU drainase	Pembangunan Kolong Retensi	KP. TANJUNG SAWAH KEL. TANJUNG KEC. MENTOK KAB. BANGKA BARAT, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	500	meter
731	ELVI DIANA, S.E., M.M	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU penerangan jalan umum	Pembangunan lampu jalan	KP. TANJUNG SAWAH KEL. TANJUNG KEC. MENTOK KAB. BANGKA BARAT, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	10	unit
738	ELVI DIANA, S.E., M.M	Masih adanya permukiman yang belum terfasilitasi PSU jalan	Pengaspalan Jalan Karena banyak yang berlobang	DESA SIMPANG TIGA KEC. SIMPANG TERITIP KAB. BANGKA BARAT, Provinsi Bangka Belitung	Verifikasi Perangkat Daerah	500	meter

# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

---

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi 7 aspek, yaitu:

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisikpotensi ekonomi dan budaya local;
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan Kawasan produksi;
4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;
5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana;
6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang;
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Untuk mendukung pencapaian tujuan daerah dalam menurunkan disparitas pembangunan antar wilayah dan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman menetapkan tujuan, sasaran serta indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Tujuan, sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja**

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan rencana tata ruang	Indeks ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	90,5
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur	Indeks Ketahanan Air	3,55
				Indeks Ketersediaan Infrastruktur Keciptakaryaan	0,05
				Indeks Ketersediaan Infrastruktur Kebinamargaan	80,21
				Indeks Ketersediaan pembinaan Jasa Konstruksi	34,29
			Meningkatkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang dan administrasi pertanahan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	55
				Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	35
Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	36,37			

# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

---

### 4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Periode 2026 maka dilakukan upaya-upaya yang dijabarkan dalam bentuk daftar program dan kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum penataan ruang, urusan wajib pelayanan dasar perumahan dan permukiman, urusan pilihan pertanahan serta urusan penunjang pemerintahan daerah. Pada masing-masing urusan tersebut diuraikan kembali menjadi program, kegiatan dan subkegiatan.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman di uraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026**

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>154.066.408.998,00</b>
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>153.726.408.998,00</b>
	<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>150.261.408.998,00</b>
1,	<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>35.000.000.000,00</b>
		[ Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah ]	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.5	35.000.000.000,00
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dianalisis	7 7	350.000.000,00
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	150.000.000,00
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	200.000.000,00
		[ Meningkatnya kepuasan pelayan internal Perangkat daerah (DPUPRRKP) ]	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80	35.000.000.000,00
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	80	27.606.589.000,00
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/ Bulan	27.571.589.000,00
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan administrasi barang milik daerah	80	35.000.000,00
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	35.000.000,00
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	survey kepuasan pelayanan kepegawaian	80	30.000.000,00
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	30.000.000,00
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	80	535.000.000,00
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000,00
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.000.000,00
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	75.000.000,00
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000,00
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	75.000.000,00
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	75.000.000,00
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			
			Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa	80	5.783.411.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Pemerintahan Daerah	<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	30.000.000,00
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	350.000.000,00
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	5.403.411.000,00
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	80	585.000.000,00
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	17 Unit	360.000.000,00
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	7 Unit	75.000.000,00
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	1 Unit	50.000.000,00
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	100.000.000,00
2,	<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			<b>14.160.000.000,00</b>
		<b>[ Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi ]</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>25,09%</b>	<b>14.160.000.000,00</b>
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Luas Kawasan Rawan Banjir yang terlindungi daya rusak air di WS Kewenangan Provinsi Persentase Peningkatan Luas Kawasan yang terlindungi dari Abrasi dan Rob di WS Kewenangan Provinsi</i>	22,22% 0%	8.060.000.000,00
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan</i>	1 Lembaga	100.000.000,00
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>	1 Dokumen	800.000.000,00
	1.03.02.1.01.0129	Rehabilitasi bangunan pengaman pantai	<i>Panjang bangunan pengaman pantai yang direhabilitasi</i>	1,5 KM	2.500.000.000,00
	1.03.02.1.01.0132	Pemeliharaan Sungai	<i>Panjang sungai yang dipelihara</i>	4,45 KM	4.360.000.000,00
	1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	<i>Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara</i>	1 Unit	300.000.000,00
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Luas Layanan Luasan Irigasi dibagi Total Luas Kewenangan Daerah Irigasi Provinsi (Ha)</i>	68,94 Ha	6.100.000.000,00
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>	2,4 KM	4.000.000.000,00
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	3 KM	400.000.000,00
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	2 KM	200.000.000,00
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>	1 Dokumen	1.400.000.000,00
	1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>	1 Lembaga	100.000.000,00
3,	<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			<b>165.000.000,00</b>
		<b>[ Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum ]</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pembinaan SPAM Agar Akses Masyarakat Terhadap Air Minum Aman Meningkat</b>	<b>0% 100%</b>	<b>165.000.000,00</b>
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dikelola/ dikembangkan</i>	1 undefined	165.000.000,00
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	7 Kabupaten/ Kota	165.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun</i>	0 Dokumen	0,00
4,	1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>			<b>756.697.000,00</b>
		[ Meningkatkan layanan persampahan regional ]	<b>Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional</b> <b>Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan</b>	<b>0%</b> <b>100%</b>	<b>756.697.000,00</b>
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	<i>Jumlah Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yang dikelola/dikembangkan</i>	1 undefined	756.697.000,00
	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan</i>	30 Orang	50.000.000,00
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>	1 Dokumen	706.697.000,00
5,	1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			<b>1.375.000.000,00</b>
		[ Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah ]	<b>Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)</b>	<b>11%</b>	<b>1.375.000.000,00</b>
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	<i>Jumlah rumah tangga yang difasilitasi akses sanitasi aman oleh Provinsi</i>	200 RT	1.375.000.000,00
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	7 Kabupaten/ Kota	75.000.000,00
	1.03.05.1.01.0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	50 Orang	1.300.000.000,00
6,	1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>			<b>18.078.303.000,00</b>
		[ Meningkatkan kualitas bangunan gedung ]	<b>Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik</b>	<b>100</b>	<b>18.078.303.000,00</b>
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	<i>Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi yang ditetapkan dan diselenggarakan</i>	35 Unit	18.078.303.000,00
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	<i>Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat</i>	30 Orang	75.000.000,00
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	<i>Jumlah Rumah Negara yang Dikelola</i>	1 Rumah Negara	5.000.000,00
	1.03.08.1.01.0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	<i>Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan</i>	7 Bangunan Gedung Cagar Budaya	49.000.000,00
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara</i>	7 Kabupaten/ Kota	85.000.000,00
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	15.135.000.000,00
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>	1 Bangunan Gedung	2.729.303.000,00
7,	1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>			<b>6.760.000.000,00</b>
		[ Meningkatkan bangunan dan lingkungan yang tertata ]	<b>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>25</b>	<b>6.760.000.000,00</b>
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota</i>	9 Penyelenggaraan	6.760.000.000,00
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	150.000.000,00
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan</i>	7 kabupaten/	63.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
			<i>pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan</i>	kota	
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan</i>	1 Kawasan	6.547.000.000,00
8,	<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>			<b>72.506.408.998,00</b>
		<b>[ Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman ]</b>	<b>Tingkat Kemantapan Jalan</b>	<b>80.21</b>	<b>72.506.408.998,00</b>
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Persentase jalan dalam kondisi mantap hasil dari kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi</i>	80,21 %	72.506.408.998,00
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>	0,71 KM	4.708.286.900,00
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	2 Dokumen	1.123.452.000,00
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	850,99 KM	392.328.900,00
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin</i>	850,99 KM	31.633.755.001,00
	1.03.10.1.01.0046	Penggantian Jembatan	<i>Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian</i>	4(jembatan) Meter	1.722.576.055,00
	1.03.10.1.01.0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar</i>	1,010881 KM	7.546.599.308,00
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala</i>	4.930503396 KM	22.067.390.477,00
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	187 (Jembatan) Meter	3.312.020.357,00
9,	<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>			<b>600.000.000,00</b>
		<b>[ Meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi ]</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli</b>	<b>25.73</b>	<b>600.000.000,00</b>
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	<i>Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</i>	6,76 %	440.000.000,00
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih</i>	30 Orang	440.000.000,00
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	<i>Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</i>	70 %	160.000.000,00
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	30 Orang	160.000.000,00
10,	<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			<b>860.000.000,00</b>
		<b>[ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang ]</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi</b>	<b>67</b>	<b>860.000.000,00</b>
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan</i>	1 Dokumen	160.000.000,00
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	<i>Jumlah publikasi informasi penataan ruang</i>	1 Publikasi	160.000.000,00
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</i>	1 Dokumen	120.000.000,00
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>	25 Orang	120.000.000,00
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	<i>Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota</i>	0 Berita Acara	0,00
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	1 Dokumen	110.000.000,00
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	<i>Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</i>	1 Laporan	110.000.000,00
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang</i>	1 Dokumen	470.000.000,00
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	<i>Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang</i>	1 Kasus	100.000.000,00
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	<i>Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat</i>	1 Dokumen	180.000.000,00
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi</i>	1 Laporan	190.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Forum Penataan Ruang		
	<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>3.465.000.000,00</b>
1,	<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>			<b>1.310.000.000,00</b>
		[ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah ]	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Perumahan yang layak Huni	100 100	1.310.000.000,00
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	6 Dokumen	195.000.000,00
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	45.000.000,00
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	30.000.000,00
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	30.000.000,00
	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	30.000.000,00
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	30.000.000,00
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	30.000.000,00
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah orang mengikuti sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	30 Orang	15.000.000,00
	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	30 Orang	15.000.000,00
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun dan direhabilitasi	20 Unit Rumah	1.100.000.000,00
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	250.000.000,00
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	10 Unit Rumah	850.000.000,00
2,	<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>1.115.000.000,00</b>
		[ Meningkatkan kualitas kawasan permukiman ]	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	2,13	1.115.000.000,00
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah penyelenggaraan penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5 Penyelenggaraan	195.000.000,00
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	30.000.000,00
	1.04.03.1.01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	50.000.000,00
	1.04.03.1.01.0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen	15.000.000,00
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	100.000.000,00
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Hektar yang ditingkatkan kualitasnya	2,13 Ha	920.000.000,00
	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk	1 Laporan	50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
			<i>Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i>		
		-	-	-	<b>1.115.000.000,00</b>
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki</i>	0 Unit Rumah	0,00
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
			<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i>	10 Unit Rumah	870.000.000,00
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
			<i>Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan</i>	0 Hektar	0,00
3,	<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			<b>1.025.000.000,00</b>
		<b>[ Meningkatnya penyediaan PSU permukiman ]</b>	<b>Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)</b>	<b>4.58</b>	<b>1.025.000.000,00</b>
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			
			<i>Jumlah Kawasan Permukiman yang difasilitasi PSU</i>	1 Kawasan	1.025.000.000,00
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman</i>	1 Laporan	25.000.000,00
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman			
			<i>Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum</i>	1 Lokasi	1.000.000.000,00
4,	<b>1.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>15.000.000,00</b>
		<b>[ Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah ]</b>	<b>Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000,00</b>
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			
			<i>Jumlah Layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah</i>	1 Layanan	15.000.000,00
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah</i>	1 Laporan	15.000.000,00
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>340.000.000,00</b>
	<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>			<b>340.000.000,00</b>
1,	<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>			<b>120.000.000,00</b>
		<b>[ Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum ]</b>	<b>Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu</b>	<b>25</b>	<b>120.000.000,00</b>
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
			<i>Jumlah dokumen fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum</i>	1 Dokumen	120.000.000,00
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			
			<i>Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah</i>	1 Dokumen	120.000.000,00
2,	<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>			<b>220.000.000,00</b>
		<b>[ Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah ]</b>	<b>Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah</b>	<b>30</b>	<b>220.000.000,00</b>
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan tanah kewenangan provinsi</i>	2 Laporan	220.000.000,00
	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi</i>	1 Laporan	100.000.000,00
	2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi			
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi</i>	1 Dokumen	120.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		
<b>J U M L A H</b>					<b>154.066.408.998,00</b>

## UPT Pengawasan dan Peralatan PUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
		<b>UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR</b>			<b>500.000.000,00</b>
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>500.000.000,00</b>
	1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>500.000.000,00</b>
1,	1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>500.000.000,00</b>
		[ Meningkatkan kepuasan pelayanan internal Perangkat daerah (UPT Pengawasan dan Peralatan) ]	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80	500.000.000,00
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (UPT Pengawasan dan Peralatan PUPR)	80	98.000.000,00
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.000.000,00
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000,00
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	45.000.000,00
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	45.000.000,00
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (UPT Pengawasan dan Peralatan PUPR)	80	147.000.000,00
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	145.000.000,00
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (UPT Pengawasan dan Peralatan PUPR)	80	210.000.000,00
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	140.000.000,00
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	30.000.000,00
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00
<b>J U M L A H</b>					<b>500.000.000,00</b>

# B A B V

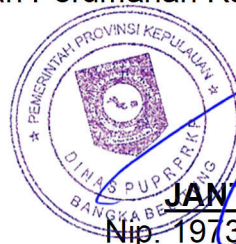
## P E N U T U P

Rencana Kerja Akhir Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Dengan adanya Rencana Kerja OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pangkalpinang, September 2025

Kepala Dinas,  
Pekerjaan Umum Penataan Ruang  
dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman



**JANTANI ALI, S.T**  
Nip. 197310222005011007